

Direksi BUMN Harus Profesional Nasionalis, Pendapatan BUMN Sumbang 24% PDB

30/07/2009 23:51:22 WIB

Oleh **Hari Gunarto dan Eko Aditya**

JAKARTA, INVESTOR DAILY

Peran badan usaha milik negara (BUMN) makin strategis dalam perekonomian. Rasio pendapatan seluruh BUMN terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat dan saat ini mencapai 24%.

Mengingat peran vital BUMN, ke depan, perusahaan negara ini harus dikelola oleh kaum profesional yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme, memiliki visi kebangsaan, dan bukan antek asing. Kriteria ini mesti masuk dalam *fit and proper test* calon direksi dan komisaris BUMN.

Sedangkan dalam konteks privatisasi BUMN, polanya harus melalui *initial public offering* (IPO), bukan lewat *strategic partner*. Pola *strategic partner* hanya memuluskan jalan bagi asing untuk menguasai BUMN-BUMN yang strategis dan berprospek sangat bagus.

Demikian terungkap dari pandangan guru besar Fakultas Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu, Direktur Inter-CAFÉ Iman Sugema, Anggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyanto, dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Mereka dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (29/7).

Mereka sependapat, dalam era globalisasi, peran BUMN semakin penting dalam stabilisasi dan motor penggerak ekonomi. Peran besar BUMN dalam perekonomian terlihat pada besaran pendapatan, laba, dividen, dan setoran pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai gambaran, dari total 138 BUMN saat ini, pendapatan yang diperoleh mencapai Rp 1.200 triliun atau 24,22% dari PDB. Pendapatan BUMN tumbuh signifikan, sekitar 35% per tahun. Total asetnya mencapai Rp 1.964 triliun pada 2008, atau tumbuh 14% per tahun.

Sekadar perbandingan, BUMN di Singapura yakni Temasek, memiliki rasio pendapatan terhadap PDB sekitar 32,4%. Tahun lalu, Temasek meraih pendapatan setara Rp 583 triliun.

Laba bersih BUMN di Indonesia juga terus menanjak, dan tahun lalu mencapai Rp 79 triliun. Itu sebabnya, setoran dividen ke negara juga terus meningkat. Tahun ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target dividen BUMN yang harus disetor ke APBN mencapai Rp 29 triliun.

Mafia Eksekutif

Mengingat peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, sejumlah kalangan mendesak agar ke depan, BUMN dikelola oleh putra-putra terbaik bangsa yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi.

Mudrajad, Iman Sugema, dan Hasto Kristiyanto menegaskan, direksi maupun komisaris BUMN semestinya orang-orang profesional yang bisa melepaskan diri dari kepentingan apapun, baik kepentingan partai politik, kepentingan asing, atau kepentingan lain yang bisa mengganggu kinerja BUMN.

Dalam konteks itu, kata Mudrajad, korporatisasi BUMN dan profesionalisme para pengelolanya menjadi hal mutlak. Mudrajad mengingatkan agar direksi dan komisaris jangan terafiliasi dengan parpol atau pejabat tertentu, agar BUMN tidak menjadi sapi perah. "Jangan sampai ada intervensi yang bisa merecoki kinerja BUMN," ujarnya.

Iman Sugema menekankan perlunya direksi BUMN sebagai sosok yang memiliki visi kebangsaan, semangat patriotisme, dan nasionalisme. Kriteria seperti itu, kata dia, semestinya masuk dalam proses *fit and proper test* terhadap kandidat direksi dan komisaris BUMN.

Iman Sugema menilai, selama ini perekrutan direksi BUMN masih kental dengan perkoncoan. "Direksi yang terpilih kebanyakan top eksekutif satu geng. Saya melihat ada mafia eksekutif dengan jaringan luas, yang masuk ke BUMN lewat jalur politik, perkoncoan, bahkan lintas batas negara," tegasnya.

Iman prihatin karena ada dugaan sebagian direksi itu adalah antek-antek asing. "Kalau cuma titipan parpol, itu kecil Bung. Yang berbahaya itu adalah direksi yang merupakan kacang-kacung asing ini," kata Iman.

Hasto Kristiyanto menyatakan, direksi BUMN tak cukup hanya profesional, tapi haruslah orang yang memahami secara mendalam politik ekonomi dan politik negara terkait dengan kedaulatan ekonomi, serta hal-hal strategis pembangunan ekonomi dalam rangka memperkokoh NKRI. "Jadi, direksi BUMN harus seorang nasionalis, yang bisa mendahulukan kepentingan-kepentingan strategis daripada kepentingan bisnis semata," ungkap Hasto.

Sedangkan Bambang Brodjonegoro mengatakan, BUMN perlu diperlakukan layaknya seperti perusahaan pada umumnya, sehingga profesionalisme manajemen menjadi kunci keberhasilan. Sebaiknya, kata dia, pengelolaan BUMN tidak lagi langsung di bawah Menneq BUMN seperti sekarang, karena mencampurkan birokrasi dan korporasi.

Menurut Bambang, pemerintah juga harus segera membuat BUMN holding seperti Temasek atau Khazanah, sehingga operasi BUMN menjadi murni korporasi dengan mengedepankan profesionalisme. "Dengan cara ini, tidak ada lagi jalur bagi parpol atau siapapun yang tidak berkepentingan mencampuri BUMN, termasuk juga dari birokrasi," ujarnya.

Sedangkan Ichsanuddin Noorsy menuturkan, direksi dan komisaris BUMN harus memiliki sifat tiga 'K' yaitu kompetensi, komitmen, dan konsisten. "Jika dipilih berdasarkan itu, BUMN akan lebih maju," ujarnya. Dia juga menyarankan agar pemerintah jangan mencari sosok direksi yang oportunis dan berasal dari partai politik.

Tiga Kriteria

Dihubungi terpisah, Sekretaris Menneq BUMN Said Didu mengungkapkan, ada tiga kriteria untuk menentukan seseorang yang pantas untuk menjabat komisaris dan direksi BUMN. Adapun untuk mencapai jabatan tersebut, seorang calon harus melewati sepuluh tahapan.

Kriteria pertama adalah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan perusahaan BUMN yang nanti ditempati. Kedua, memiliki integritas dan ketiga berani untuk mengambil keputusan.

Mengenai kriteria harus berjiwa nasionalis, patriotisme, dan terbebas dari pengaruh pihak asing, Said menjelaskan, hal itu sulit untuk dinilai. Meski demikian, lanjutnya, kriteria tersebut nantinya bisa terlihat dalam rekam jejak kandidat. "Dari situ juga akan diketahui apakah dia berniat untuk membesarkan BUMN atau tidak," katanya.

Said menambahkan, kriteria tersebut memang dipertanyakan saat melakukan *fit and proper test* calon direksi BUMN. Bahkan, ada sepuluh tahapan sebelum seseorang dapat menduduki jabatan sebagai direksi ataupun komisaris.

Tahapan tersebut di antaranya meliputi seleksi administrasi, seleksi di komisaris, seleksi lewat lembaga independen, evaluasi dan wawancara dengan komisaris BUMN, serta wawancara langsung dengan menteri negara BUMN.

IPO Lebih Baik

Menyangkut arah privatisasi BUMN, Mudrajad merekomendasikan bahwa pola yang paling tepat adalah melalui penjualan saham di bursa (IPO). Model ini memberikan kesempatan luas kepada public untuk memiliki saham-saham BUMN yang bagus.

"IPO sangat bagus karena BUMN yang bersangkutan harus terbuka dan transparan, dan dituntut untung sebelum masuk bursa efek," tutur Mudrajad.

IPO juga bisa menghindarkan jatuhnya BUMN ke tangan asing, seperti yang terjadi bila pola privatisasi menggunakan pola *strategic partner*.

Bambang Brodjonegoro sependapat, privatisasi BUMN sebagai upaya memperbaiki kinerja BUMN dan mencari modal segar sebaiknya ditempuh lewat IPO. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang sudah besar dan sehat. "Tetapi untuk perusahaan yang kurang sehat dan tidak mengemban tugas untuk hajat hidup orang banyak, sebaiknya dijual secara *strategic partnership* atau sekalian dilikuidasi," ujar Bambang.

Sedangkan Iman Sugema menolak privatisasi untuk sementara ini. "Lebih baik disetop dulu untuk sementara, paling tidak tahun ini. Terlalu berbahaya. Bisa-bisa aset BUMN jatuh ke asing," tegasnya.

Hasto Kristiyanto mengingatkan agar privatisasi memperhatikan segi-segi ideologi dan kedaulatan ekonomi negara. "Privatisasi *kan* ada pergantian kepemilikan, tapi tidak harus pindah ke tangan asing, apalagi segala-galanya dikuasai oleh mereka," ujarnya.

Said Didu juga sependapat bahwa privatisasi lebih baik dilakukan lewat IPO. "Tapi itu harus selektif," kata dia. **(raj/ad)**